

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN (DAU, DAK, DBH)  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN/ KOTA PROVINSI ACEH**

**Diky Alfitra Desky<sup>1</sup>, Erlina<sup>2</sup>, Sirojuzilam<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

<sup>1</sup> Korespondensi Author e-mail: [arpinafn@gmail.com](mailto:arpinafn@gmail.com)

Diterima : 27032023

Direvisi: 29032023

Disetujui: 01042023

**ABSTRACT**

*Each region has General Allocation Funds (GAF), Special Allocation Funds (SAF), Revenue Sharing Funds (RSF) and Capital Expenditures that differ from one region to another will have different regional financial performance impacts, resulting in different development developments. not the same from one region to another. The aim of this study was to analyze the partial and simultaneous influence of GAF, SAF, RSF, and Capital Expenditures on the Regional Financial Performance of the Districts/Cities of Aceh Province. Research was conducted in Aceh Province. The research design is a quantitative study using archival secondary data for 2017-2021 (data on GAF, SAF, RSF, Capital Expenditure and Regional Financial Performance) library of the Central Bureau of Statistics (CBS) of the District/City Government of Aceh Province. The analytical method used in this study is multiple regression analysis. The results showed that the General Allocation Fund (GAF) is positive and significant effect on the regional financial performance of Aceh Province. The Special Allocation Fund (SAF) is positive and significant effect on the regional financial performance of Aceh Province. Revenue Sharing Fund (RSF) has a positive and significant effect on the regional financial performance of Aceh Province. Capital Expenditure (CE) has a negative and significant effect on the regional financial performance of Aceh Province. GAF, SAF, RSF and Capital Expenditures simultaneously have a positive and insignificant effect on the regional financial performance of Aceh Province.*

**Keywords:** GAF; SAF; RSF; Capital Expenditures; financial performance.

**ABSTRAK**

Setiap daerah memiliki Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal yang berbeda-beda yang berpengaruh pada kinerja keuangan daerah yang berbeda juga, hal ini berakibat pada perkembangan pembangunan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh DAU, DAK DBH, dan Belanja Modal secara parsial dan simultan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Aceh. Desain penelitian adalah kuantitatif studi dengan menggunakan data sekunder arsip 2017-2021 (data DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal serta Kinerja Keuangan Daerah) dari perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Metode Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Aceh. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Aceh. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Aceh. Belanja Modal (BM) memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Aceh. DAU, DAK, DBH serta Belanja Modal secara simultan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Aceh.

**Kata kunci:** DAU; DAK; DBH; Belanja Modal; Kinerja Keuangan Daerah.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan sebuah strategi dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dari berbagai aspek yang terdiri dari sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan merupakan sebuah konsep yang sejalan, baik itu dari segi pertumbuhannya, proses pembangunan, serta segi perekonomian di Indonesia yang memiliki berbagai macam tantangan diantaranya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan setelah tahun 2001 dan merupakan satu titik perubahan dari pemerintahan yang dahulunya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, dalam artian daerah otonomi diberikan hak dan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonomi tersebut adalah keseluruhan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat otonomi menurut pemerintahannya sendiri berdasarkan masukan yang diterima dari masyarakat. Hal ini menandai dimulainya era kebebasan bagi daerah untuk menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan pembangunan secara mandiri seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah.

Terdapat 3 sumber pendapatan dari sumber dana daerah yang didapatkan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, serta pendapatan lain-lain daerah yang sah. Pusporini (2004) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh dari selisih kebutuhan suatu daerah dengan kemampuan daerah tersebut mengelola pendanaan dan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam mengatur DAU tersebut. Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan kepada daerah yang keperluan keuangannya kecil tetapi memiliki keuangan yang mencukupi sehingga daerah tersebut memperoleh anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang kecil, begitu juga sebaliknya.

Rahmah dan Zein (2016) mengungkapkan bahwa Provinsi Aceh merupakan provinsi yang terdiri dari 23 pemerintah daerah dan terbagi atas 18 Pemerintahan

Kabupaten serta adanya 5 Pemerintahan Kota. Secara umum, 23 kabupaten serta kota di daerah Provinsi Aceh yang ketergantungan dengan pemerintah pusat.

Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2017-2021 terhadap sebanyak 23 kabupaten/kota daerah Provinsi Aceh, ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penerimaan masih malampau jauh, dalam artian semua kabupaten serta kota daerah Provinsi Aceh masih ketergantungan kepada pendanaan dari pemerintah pusat dalam hal pembiayaan daerah di Provinsi Aceh. Hal ini dapat diketahui melalui jumlah PAD dan total pendapatan di 23 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Aceh.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah juga menemukan perbedaan hasil. Hasil penelitian yang dilakukan Anwar, dkk (2016) mengungkapkan bahwa jika pendanaan dana perimbangan yang diperoleh daerah tinggi maka otomatis kinerja keuangan pemerintah daerah juga meningkat, yang berarti hal ini dikarenakan adanya dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan proses penyelenggaraan pemerintahan serta dalam pembiayaan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang telah dilakukan Putri (2015) juga mengungkapkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan serta signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2017) menunjukkan bahwa jika dana perimbangan (DAU, DAK, dan BDH) yang diterima dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah besar maka hal ini tentu mengakibatkan pemerintah daerah akan ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan daerah, yang berakibatkan kinerja keuangan pemerintahan daerah juga akan menurun.

Santosa (2013) juga menemukan bahwa dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diterima tinggi tidak berarti semakin tinggi kinerja keuangan daerah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak optimal dalam menggali potensi yang dimiliki daerahnya agar mendapatkan pendapatan yang lebih. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Purbandharmaja (2013) serta Nisa (2017) juga menemukan hasil yang sama yaitu dana perimbangan (DAU, DAK, dan BDH) memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Panji, dkk (2016) menemukan bahwa pertumbuhan kinerja keuangan pemerintahan daerah akan meninggi jika pengalokasian dana untuk pembangunan infrastruktur pemerintah daerah bertambah banyak. Selanjutnya, efisiensi di berbagai sektor dan produktivitas masyarakat juga semakin meningkat jika adanya infrastruktur yang baik (Harahap, 2017). Hasil penelitian Jannah dan Nasir (2018) dan Siswiyanti (2015) juga mengungkapkan bahwa belanja modal dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan adanya perbedaan dari hasil temuan penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa beberapa daerah yang menerima dana perimbangan yang tinggi dari pemerintah pusat maka semakin meningkat pula kinerja keuangan di daerah tersebut, sedangkan penelitian lain mengungkapkan bahwa dengan tingginya dana perimbangan dari pemerintah pusat yang diterima oleh pemerintah daerah mengakibatkan pemerintah daerah mengalami ketergantungan sehingga berefek pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang menurun. Sehingga hal ini menjadi pertanyaan bagaimana dengan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki wewenang mengatur serta mengurus pemerintahan daerahnya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas bagaimana dana perimbangan yang diantaranya DAU, DAK, dan DBH serta belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui perkembangan bantuan dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dan Belanja Modal serta dampaknya kepada kinerja keuangan suatu daerah khususnya Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif studi. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka. Analisis data penelitian ini menggunakan statistik inferensial, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana hubungan serta pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas, dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel maupun lebih (Rusiadi, *dkk*, 2014). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dengan cara mengumpulkan beberapa data yang dibutuhkan untuk penyelesaian penelitian ini, dan data tersebut diperoleh dari data publikasi.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa pengumpulan bahan dan data dari tahun 2017-2021 yang sesuai dengan bahasan penelitian dan telah terdapat pada catatan serta laporan historis didalam arsip (data mengenai Dana Perimbangan DAU, DAK, DBH, dan Belanja Modal serta Kinerja Keuangan Daerah) yang didapatkan dari perpustakaan Badan Pusat Statistik(BPS) Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Data tersebut kemudian dianalisa dengan metode analisa regresi linier berganda, dengan metode statistik deskriptif dan infrensial yang dipakai untuk menganalisis data lebih dari dua variable.

Hipotesis penelitian yang digunakan adalah metode uji regresi linier berganda. Dengan menganalisis pengaruh variabel dependen dan variabel independent yang diteliti sehingga dapat disimpulkan. Sebelum melakukan uji hipotesis dengan metode analisa regresi maka dibutuhkan melakukan uji asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Multikolinieritas. Lalu dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Pengujian Simultan (Uji F), dan Pengujian Parsial (Uji-t).

Pengujian hipotesis menggunakan model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1DAU + b_2DAK + b_3DBH + b_4BM + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Ketergantungan %)

DAU = Dana Alokasi Umum (Rp. Jutaan)

DAK = Dana Alokasi Khusus (Rp. Jutaan)

DBH = Dana Bagi Hasil (Rp. Jutaan)

BD = Belanja Modal (Rp. Jutaan)

a = Konstanta

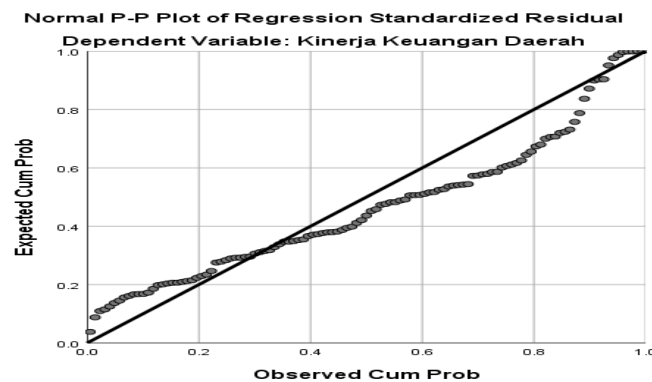
b = Koefisiens regresi

e = error

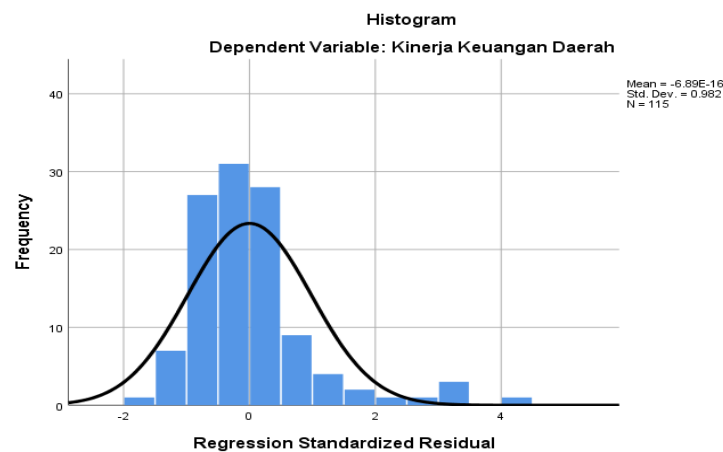
## PEMBAHASAN

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi. Pengujian tersebut yaitu Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, serta Uji Multikolinieritas. Selanjutnya dilakukan Uji Hipotesa dengan menggunakan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji Simultan (Uji F), serta Uji Parsial (Uji-t).

Hasil Uji Normalitas:



Gambar 1. Normal P-Plot of Regression Standardized Residual  
Sumber; Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh



Gambar 2. Histogram Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh  
Sumber; Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh

Dari hasil grafik normal plot pada Gambar 1 dan 2 dapat dilihat dimana data tersebar di antara garis diagonal dan data searah dengan arah garis diagonal. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa data residual berdistribusi normal. Pada Gambar 2 Hasil grafik histogram juga dapat dilihat bahwa data residual berdistribusi normal berbentuk lonceng yang hampir sempurna (simetris).

Hasil Uji Multikolinieritas:

Tabel.1. Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	.671	1.490
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	.893	1.119
	Dana Bagi Hasil (DBH)	.971	1.030
	Belanja Modal	.675	1.482

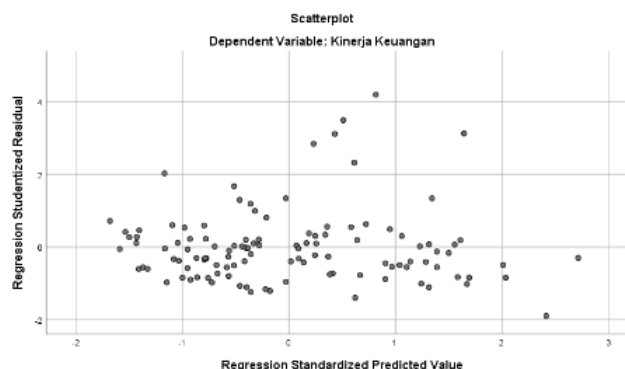
a. Variabel Dependent: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Hasil pengujian multikolinieritas yang dilakukan pada tabel terlihat nilai VIF dan *tolerance* sebagai berikut : Variabel DAU memiliki nilai VIF yaitu 1,490 dan merupakan *tolerance* sebesar 0,671. Variabel DAK memiliki nilai VIF yaitu 1,119 dan merupakan *tolerance* sebesar 0,893. Variabel DBH memiliki nilai VIF yaitu 1,030 dan merupakan *tolerance* sebesar 0,971. Variabel Belanja Modal memiliki nilai VIF yaitu 1,482 dan merupakan *tolerance* sebesar 0,675.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui jika nilai VIF < 10 dan merupakan *tolerance* > 0,10 maka tidak terdapat adanya multikolinieritas dan nilai-nilai tersebut yang diperoleh dari perhitungan sudah sesuai dengan ketentuan nilai VIF dan merupakan *tolerance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak terdapat multikolinieritas maka model tersebut sudah memenuhi syarat sebagai asumsi klasik dalam analisis regresi.

Hasil Uji Heterokedastisitas



Gambar 3. Grafik *Scatterplots* Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh  
 Sumber; Badan Pusat Statistik(BPS) Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh

Pada Gambar 3 Grafik *scatterplots* diatas dapat dilihat bahwa banyaknya titik menyebar acak juga menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu secara teratur, maka dari itu dipat disimpulkan tidak adanya heterokedastisitas pada model regresi tersebut. sehingga menyeluruh model regresi tersebut sesuai syarat uji asumsi klasik.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel.2. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

<b>Model Summary</b>				
Model	R	RSquare	Adjusted RSquare	Std. Error of the Estimate
1	.432 <sup>a</sup>	.187	.157	4.76190

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, BDH, DAK, DAU

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* adalah 0,157 yang berarti keempat variabel independen di atas (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal) mampu menjelaskan 25,7 % dari kinerja keuangan suatu daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh, sedangkan selebihnya yaitu 84,3 % dapat diperjelas oleh variabel lain dan tidak ikut serta dalam penelitian ini, variable tersebut antara lain PAD inflasi dan jumlah penduduk.

Tabel.3. Hasil Uji Simultan (Uji F)

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Model		Sum of Squares	df	Mean	F	Sig.
1	Regressi	572.510	4	143.127	6.312	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2494.328	110	22.676		
	Total	3066.838	114			

a. Variabel Dependent: Kinerja Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, DBH, DAK, DAU

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Uji statistik secara simultan menunjukkan tingkat probability 6,312 dengan nilai signifikan sebesar  $0,00 < 0,05$ , dalam arti hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal secara simultan memiliki pengaruh serta signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh.



Tabel.4. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.244	1.874		2.798	.006
	Dana Alokasi Umum	.012	.003	.366	3.488	.001
	Dana Alokasi Khusus	.017	.009	.186	2.049	.043
	Dana Bagi Hasil	.048	.024	.177	2.029	.045
	Belanja Modal	-.016	.007	-.247	-2.359	.020

a. Variabel Dependent: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Pada Tabel 4 dapat dilihat uji statistik t yang didapatkan adalah:

Variabel Dana Alokasi Umum ( $X_1$ ) dengan nilai t hitung yaitu  $3,488 > t$  tabel dengan nilai signifikan yaitu  $0,001 < 0,05$ . Hal ini berarti hipotesis diterima dan berarti variabel DAU memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap Kinerja Keuangan kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil ini menunjukkan semakin besar DAU yang diperoleh maka semakin meningkatkan pula laju pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Rahmah dan Zein (2016) dan penelitian Mawarni dan Abdullah (2013) juga mengungkapkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar DAU yang diperoleh oleh pemerintah daerah maka dapat meningkatkan Kinerja Keuangan pemerintah daerah.

Kondisi suatu daerah berhubungan dengan kemampuan daerah tersebut dalam memperoleh pendapatan yang begitu bervariasi. Pendapatan tersebut dapat berupa pelaksanaan kegiatan ekonomi yang meninggi atau rendah, kekayaan sumber daya alam atau tidak, serta adanya standar pelayanan minimum yang tercapai dan wajib dijaga di setiap daerah. Oleh karena itu dengan adanya DAU yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berakibat pada peningkatan Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah. Akan tetapi, jika kemandirian suatu daerah tersebut menurun maka hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat.

Variabel Dana Alokasi Khusus ( $X_2$ ) dengan nilai t hitung sebesar  $2,049 > t$  tabel dengan nilai signifikan sebesar  $0,043 < 0,05$ . maka hipotesis diterima dimana variabel DAK berpengaruh positif serta signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAK mempunyai hubungan yang searah dengan kinerja keuangan dalam artian semakin meninggi DAK maka kinerja keuangan daerah akan semakin baik juga. Anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan akan lebih tinggi dan mampu meningkatkan pelayanan terhadap publik dan memiliki dampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang meningkat karena DAK yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat semakin tinggi. Kaitan dengan DAK adalah terdapatnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan tertentu yang merupakan otonomi daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, hal ini dikarenakan DAK yang diperoleh pemerintah daerah juga tinggi sehingga dapat digunakan dalam menjalankan program kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian Budiana (2021) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dimana penelitiannya menunjukkan hasil bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan mekanisme pengiriman pendanaan pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan dapat mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah serta pelayanan antar bidang sehingga meningkatnya sarana dan prasarana fisik tiap daerah sesuai dengan prioritas nasional (Subekan, 2012). Dalam hal ini yang menjadi urusan daerah dalam prioritas nasional adalah: kebutuhan transmigrasi, kebutuhan berbagai investasi atau sarana dan prasarana, Kinerja Keuangan Daerah, pengadaan jalan di wilayah terpencil, serta saluran irigrasi primer. Perlu diketahui bahwa DAK memiliki tujuan dalam memajukan infrastruktur fisik yang merata dan dinilai sebagai prioritas nasional.

Variabel Dana Bagi Hasil ( $X_3$ ) dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $2,029 > t$  tabel dengan nilai signifikan sebesar  $0,045 < 0,05$ . maka hipotesis diterima dimana variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif serta signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Variabel DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Realisasi DBH juga tergantung pada kebijakan pemerintah pusat mengenai DBH. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nisa (2017) yang membuktikan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. DBH adalah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada daerah berdasarkan persentase sehingga mampu membiayai kebutuhan daerah guna mendukung melaksanakan desentralisasi, hal ini tertuang didalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 tahun 2005 mengenai Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) Pasal 1 ayat 9.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah otonomi daerah tentang kemampuan mengelola berbagai macam sumber perolehan Negara yang merupakan hasil dari setiap daerah penghasil (*by origin*) berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Beberapa sumber penerimaan perpajakan yang dihasilkan dibagi adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah serta Bangunan (BPHTB). Penelitian yang dilakukan Bugis (2012) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan oleh Dana Bagi Hasil yang berarti jika terjadi peningkatan capaian pertumbuhan ekonomi daerah maka terjadi kenaikan nilai pendapatan daerah tersebut.

Variabel Belanja Modal ( $X_4$ ) dengan nilai  $t$  hitung yaitu  $-2,359 > t$  tabel dengan nilai yang signifikan yaitu  $0,020 < 0,05$ . maka hipotesis diterima dimana variabel Belanja Modal memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Variabel Belanja Modal memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Pengaruh yang negatif menunjukkan bahwa adanya ketidakefisienan anggaran, dimana tidak meratanya penyaluran anggaran dana dalam pembangunan baik dibidang infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dwiyanto (2018) yang menyimpulkan bahwa pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah adalah negatif.

Belanja Modal adalah komponen dari bagian belanja daerah yang memiliki arti pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian/pengadaan maupun pembangunan aset yang memiliki manfaat lebih dari dua belas bulan untuk dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan serta bermanfaat bagi masyarakat. Mengelola Belanja Modal yang optimal yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi serta berhubungan pada penekanan tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Strategi alokasi anggaran ini dapat menjadi alat yang mampu mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional serta mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan belanja Kinerja Keuangan Daerah. (Setiyawati dan Hamzah, 2007).

## KESIMPULAN

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Penggunaan DAU yang baik dan tepat sasaran serta dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki integritas tinggi terhadap kemajuan provinsi Aceh akan meningkatkan kinerja keuangan provinsi Aceh, sehingga tujuan kemampuan keuangan setiap daerah yang merata dalam mendanai kebutuhan Daerah Aceh sebagai upaya pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan Provinsi Aceh. Dimana jika semakin tinggi dana yang digunakan menjalankan program kerja maka semakin tinggi DAK yang diperoleh pemerintah daerah yang berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena banyaknya dana yang diperoleh untuk membiayai kegiatan tertentu yang merupakan otonomi daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang positif serta signifikan pada kinerja keuangan kabupaten/kota Provinsi Aceh. Dimana pendanaan untuk memenuhi kebutuhan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Desentralisasi bersumber dari hasil pendapatan APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan angka *persentase*.

Belanja Modal (BM) memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Tingginya alokasi belanja tak langsung dalam struktur belanja publik mengakibatkan ketidakefisienan penggunaan anggaran.

DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota Provinsi Aceh. Anggaran Pemerintah Provinsi Aceh masih sangat tergantung dengan transfer dari pemerintah pusat. Besarnya jumlah anggaran yang didapatkan dari pusat tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil yang menandakan belum adanya ide baru yang kreatif serta anggaran lebih banyak habis untuk belanja pegawai dan sekitar 20% saja untuk belanja modal.

Hal-hal yang dapat diperhatikan terkait hasil penelitian ini adalah Belanja Modal (BM) kabupaten/kota Provinsi Aceh harus diperhatikan dengan baik, karena merupakan sumber utama dalam membangun daerah untuk itu diperlukan pengawasan secara berkala oleh pemerintah terhadap penyaluran dana guna keperluan belanja modal sehingga tepat sasaran dan adanya transparansi alokasi belanja modal agar sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan diharapkan kepada Pemerintah di Aceh agar dapat

meningkatkan potensi yang dapat mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menemukan formulasi agar manajemen anggarannya bisa lebih baik pengelolaannya sehingga DAU, DAK, dan DBH yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat digunakan dalam realisasi yang tepat demi kemajuan pembangunan wilayah Aceh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M.L., S.W. Palar & J.L. Sumual. (2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(02): 218-232.
- Budiana, R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2020). *e-Proceeding of Management*, 8(6): 201-215.
- Bugis, M. (2012). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Periode Tahun 2002-2009. *Maneksi Jurnal Manajemen Ekonomi & Akuntansi*, 1(1): 58-68.
- Dewi, S. L. & I B.P. Purbandharmaja. (2013). Pengaruh PAD, PMA dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(11): 502-512.
- Dwiyanto, E.D. (2018). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa Tahun 2016. Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Harahap, R.U. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Kitabah*, 1(1): 1-13.
- Haryanto, D. & P.H. Adi. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar 26-28 Juli 2007.
- Jannah, K. & M. Nasir. (2018). Analisis Pengaruh PAD, DAK, dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(2): 248-255.
- Mawarni & D. S. Abdullah. (2013). Pengaruh Pendapatan asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 2(2): 80-90.
- Nisa, A.A. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(2): 203-214.

- Panji, I P. Barat. & I G.B. Indrajaya. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Bali. *E - Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(3): 316- 337.
- Pusporini, D. (2004). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi Fiskal 2001-2003. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Putri, Z, E. (2015). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen. UINSyarif Hidayatullah Jakarta*, 5 (2): 180-192.
- Rahmah, A.R & B. Zein. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bbagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1): 213-220.
- Rusiadi., N. Subinatoro & R. Hidayat. (2014). *Metode Penelitian. Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel*. Medan: USU Press.
- Santosa, B. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan di 33 Provinsi Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 5(2): 28-39.
- Setiyawati, A & A. Hamzah. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(2): 211-228.
- Siswiyanti, P. (2015). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 7(1): 1-17.
- Subekan, A. (2012). *Keuangan Daerah: Terapi Atasi Kemiskinan*. Malang: Dioma.